



BULETIN PARLEMENTARIA

NOMOR 953/I/IV/2017 • APRIL 2017



DPR RI PASTIKAN REFORMA AGRARIA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

4 Fadli Zon:
Tan Malaka Sebagai
Nasionalis Muslim

22 Biro Pemberitaan Parlemen
Raih Dua Penghargaan
PRI Award 2017

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

DPR RI Pastikan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Konsultasi dengan sejumlah Menteri, membahas program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria yang akan dijalankan Pemerintah. DPR RI memastikan, program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.



Rapat Konsultasi DPR RI dengan Pemerintah membahas Reforma Agraria

“ Dari hasil Rapat Konsultasi, pada prinsipnya DPR RI mendukung program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria yang akan dijalankan Pemerintah. DPR RI mendorong agar program tersebut dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta dilandasi payung hukum yang kuat, sehingga tidak

menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto, usai rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/03).

Politisi F-PG itu mengapresiasi rencana Pemerintah yang akan meredistribusi sekitar 9,1 juta hektar lahan yang akan dijadikan objek Reforma Agraria. Menurutnya, program

tersebut sebagai salah satu jawaban mengurangi kemiskinan dan menghapus kesenjangan, mengatasi masalah ketimpangan struktur agraria, memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan.

Dan untuk memastikan program ini berjalan baik, Novanto mengatakan pihaknya akan membentuk Tim Pengawas DPR RI tentang Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria yang dipimpin Pimpinan DPR RI bersama Fraksi-Fraksi di DPR RI.

“Tim ini akan memastikan program tersebut dapat diimplementasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Saya berharap agar program ini tepat sasaran pada rakyat kecil dan miskin,” imbuh politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur itu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djailil mengatakan, sejumlah catatan yang diberikan oleh Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi DPR RI dan Pimpinan Fraksi DPR RI akan menjadi catatan penting Pemerintah, dalam melaksanakan program redistribusi aset dan reforma agraria.

“Sehingga program ini berjalan dengan tepat guna dan sasaran, demi kepentingan bangsa dan negara,” harap Sofyan.

Rapat Konsultasi ini sebagai tindak lanjut Rapat Konsultasi Pimpinan Lembaga Negara dengan Presiden Joko Widodo tanggal 14 APRIL 2017 terkait Redistribusi Aset dan Reforma Agraria. Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan DPR RI, Pimpinan Banggar, Pimpinan Komisi I, II, III, IV, V, VII, dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI.

Dari perwakilan Pemerintah, hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Badan Pusat Statistik; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepolisian Republik Indonesia; dan Tentara Nasional Indonesia. ■

(sf) foto: jaksa/hr



Indonesia dan Portugal Sepakat Tingkatkan Hubungan Kedua Negara

Indonesia dan Portugal sepakat untuk meningkatkan hubungan kedua negara, baik hubungan Pemerintah maupun Parlemen antar kedua negara. Peningkatan hubungan itu melalui penguatan bidang politik, ekonomi dan kebudayaan.

Demikian ditekan-kan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto, usai menerima kunjungan Duta Besar Portugal untuk Indonesia, Rui Fernando Suceno Do Carmo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/03). Dalam pertemuan itu, Agus didampingi Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto dengan Dubes Portugal

(F-PD), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifulah Tamliha (F-PPP), dan Anggota BKSAP DPR RI Anthon Sihombing (F-PG).

"Pemerintah Indonesia dan Portugal sepakat untuk memperkuat bidang politik, ekonomi dan juga kebudayaan. Apalagi kita ketahui beberapa saat yang lalu, Portugal pernah mengalami kesulitan ekonomi, dan mereka akan memberikan gambaran penyelesaian masalah pada bidang ekonomi," jelas Agus.

Sementara terkait hubungan Parlemen, Agus pun berharap hubungan kedua negara ini semakin ditingkatkan. Apalagi DPR RI sudah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen Portugal. Parlemen Portugal pun akan membentuk GKSB Portugal

Indonesia.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tahun ini GKSB Indonesia akan mengunjungi Portugal, dan akan diusahakan bertemu dengan Parlemen Portugal," imbuh politisi F-PD itu, sembari mengatakan pihaknya juga mendorong agar hubungan ekonomi ditingkatkan, mengingat masih kecilnya neraca perdagangan kedua negara.

Selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai rencana kedatangan Presiden Portugal ke Indonesia. "Sehingga tadi juga disampaikan agar kami semua menyiapkan kedatangan tersebut, supaya kedatangan memberikan manfaat dan perbaikan bagi hubungan antara kedua negara," tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

(sf). Foto: Jakarta/ahr

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,

Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,

Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Jaka Nugraha,

Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman,

R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadillah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

Pimpinan Penerbitan

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

Penanggung Jawab Produksi

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

Staf Produksi

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

Distribusi dan Sirkulasi

Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

Koordinator

Mujiono

Staf Distribusi dan Sirkulasi

Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita, Ifan, Siti Rondiyah, Oji

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Fadli Zon: Tan Malaka Sebagai Nasionalis Muslim

Tan merupakan pemikir awal sebelum kemerdekaan Indonesia yang memiliki konsep tentang negara republik.

Tan Malaka adalah tokoh yang penting dalam pendirian Republik Indonesia. Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon dalam sambutan diskusi yang bertajuk "Pemikiran dan Perjuangan Tan Malaka," menegaskan kembali, bahwa Tan adalah pahlawan nasional, ini berdasar pada Keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963.

Wakil ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang punya perhatian mendalam pada sejarah dan kebudayaan ini berpendapat, Tan Malaka adalah seorang nasionalis muslim. "Yang jelas dia adalah seorang nasionalis, itu satu hal yang membedakan tokoh-tokoh kiri yang lain, dan dia juga seorang muslim," ujar Fadli di *Operation Room*, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/03).

Selain itu, Fadli juga mengungkapkan, Tan merupakan pemikir awal sebelum kemerdekaan Indonesia yang memiliki konsep tentang negara republik. Tan disebut-sebut sebagai konseptor pertama negara Republik Indonesia, 1925 tahun ketika karya ini keluar belum terjadi peristiwa Sumpah Pemuda (1928).

"Salah satu yang paling monumental adalah Naar de Republiek atau menuju republik, itu gagasan dari Tan Malaka, yang dituangkan dalam sebuah buku tahun 1925. Jadi ketika orang-orang belum ada pemikiran tentang Indonesia merdeka, Tan Malaka sudah menulis menuju Republik Indonesia," Fadli menjabarkan.

Dalam sambutannya, Fadli juga mengatakan, pemikiran Tan tentang negara berlandaskan pada nilai-nilai

humanis. Dia juga dinilai sebagai revolusioner sejati yang mengharapkan Indonesia merdeka 100 persen. Konsekuensi dari itu Tan tidak pernah mau bekerjasama dengan kolonialis, Tan telah mengorbankan hidupnya demi republik tetapi yang amat disayangkan dia tidak bisa menikmati kemerdekaan Indonesia. "Bagaimana menempatkan Tan Malaka lebih terhormat sebagai pahlawan," tandas Fadli.

Dalam acara diskusi ini juga mengundang sebagai pembicara, Sejarawan dan Peneliti Belanda yang konsen pada riwayat hidup dan pemikiran Tan Malaka, Harry A. Poeze. Dalam penjelasannya dia membedah watak Tan Malaka sebagai seorang Minangkabau.

Dia juga mengatakan, Tan saat berpidato di Komintern, yakni Kongres Komunis Internasional ke-empat pada tanggal 12 November 1922. Tan secara terang-terangan mendukung gerakan Pan-Islamisme, saat masa kolonialisme, dia mengatakan, Islam adalah kekuatan revolusioner yang anti pada penjajahan.

Tan menentang thesis yang didraf oleh Lenin dan diadopsi pada Kongres Kedua, yang telah menekankan perlunya sebuah "perjuangan melawan Pan-Islamisme", Tan Malaka mengusulkan sebuah pendekatan yang lebih positif dan memihak Islam. ■

(eko/scj).Foto: Jayadi/hr



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Fadli Zon

Novanto Ungkap Kisah Hidupnya dari Sopir Hingga Ketua DPR RI



Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, kalangan muda khususnya mahasiswa, jangan takut berwirausaha. Selain belajar di kampus, mahasiswa juga sebaiknya memulai bisnis sekecil apapun.

“ Saat mahasiswa, agar tidak perlu membayar kos, saya menjadi supir keluarga di tempat saya tinggal. Saya juga jadi pembantu, membersihkan rumah, dan lainnya,” kata Setya Novanto dalam forum seminar nasional yang membahas seputar penguatan ekonomi mikro & UMKM di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (25/03).

Ia menambahkan, setiap pagi diminta mengantar anak-anak tuan rumah ke sekolah dan sebelumnya jam 4 pagi jualan beras di pasar Surabaya. Dari pekerjaan itu, ia mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk keperluan kuliah di Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Novanto, sapaan akrabnya, tumbuh dan besar dengan kondisi perekonomian yang kurang mampu, tidak menjadikan ia minder atau kehilangan kepercayaan diri. Bahkan, dirinya menceritakan pernah menjadi tukang cuci mobil di salah satu *dealer* di Surabaya.

"Mungkin karena melihat etos kerja saya, singkat cerita, suatu hari pemilik *dealer* menanyakan kepada saya bagaimana cara meningkatkan penjualan mobil dan menaikkan omset perusahaan.

Karena saya kuliah mengambil akuntansi, sedikit banyak tahu tentang perekonomian. Alhamdulillah, akhirnya saya dipercaya menjadi Ketua penjualan mobil Indonesia bagian timur di perusahaan tersebut," kenang Novanto.

Sampai akhirnya, bisa menjadi pengusaha nasional dan Ketua DPR RI,

sosial kita sama. Karena itu, jangan pernah kehilangan kepercayaan diri dan jangan pernah takut melangkah" ujar Novanto.

Selain itu, Ketum Golkar ini mengaku kagum dengan masyarakat Minangkabau yang memiliki etos kerja yang tinggi, terutama dalam hal perdagangan. Semangat inilah yang akan menumbuhkan para wirausahawan dari berbagai tingkatan.

Khusus mengenai penguatan UMKM, Novanto mengajak semua para pelaku usaha di tanah Minangkabau untuk memanfaatkan program Pemerintah berupa pemberian subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Upaya Pemerintah mendorong KUR melalui kebijakan subsidi bunga

adalah langkah strategis, tidak hanya untuk memajukan UMKM, melainkan juga untuk menyelamatkan perekonomian nasional dari ancaman pertumbuhan rendah dan minimnya kesempatan kerja. ■



Ketua DPR RI Setya Novanto bersama para mahasiswa STIE di Pariaman

Taufik Kurniawan Tak Setuju Keterwakilan Parpol di KPU

Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan tidak setuju mengenai adanya unsur keterwakilan partai politik dalam struktur komisioner KPU. Hal itu memungkinkan KPU sebagai lembaga independen menjadi tidak objektif, serta tidak mungkin pula penyelenggara dan peserta pemilu berasal dari pihak yang sama.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku, Taufik Kurniawan

“ Bagaimana mungkin pemain sama wasit adalah orang yang sama?” ujar Taufik Kurniawan usai menghadiri pelantikan Sekjen DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/03).

KPU sebagai penyelenggara pemilu, menurutnya harus memiliki aspek jujur dan adil yang perlu dikedepankan. Sehingga jika ada unsur partai politik dalam KPU dinilai akan menimbulkan keraguan di masyarakat. “Kalau independensi pemilu sudah terkoyakkan, bagaimana mungkin hasil yang diterapkan akan objektif dan independen.

Klausul jujur dan adil dipertanyakan nanti,” sambung Taufik.

W a c a n a
keterwakilan
partai politik di

KPU ini mengemuka usai Pansus Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko. Dalam hal ini menurut pandangan Taufik, sistem yang diterapkan di Jerman dan Meksiko belum tentu akan berhasil di Indonesia, menurutnya akan ada kerumitan dalam mengakomodir partai politik yang diluar DPR RI. Selain itu, Indonesia memiliki karakteristik partai politik dan pemilih yang berbeda dengan negara lain.

“Kalau sudah dikotak-kotakkan dari awal harus dari parpol, itu semacam semi tertutup. Hanya mewakili parpol. Nanti kalau anggotanya tiap parpol, 10. Kalau parpolnya nanti 45? 49? Parpol yang di luar DPR RI? Ini ada kerumitan juga,” kata Taufik.

Dalam sejarahnya, Indonesia pun sudah pernah mengadopsi sistem KPU yang terdiri dari perwakilan partai politik pada pemilu 1999 yang diikuti sebanyak 48 partai politik. Saat itu ada 53 komisioner KPU yang dipimpin Mantan Menteri Dalam Negeri Rudini sebagai ketua. ■

(hs) Foto: Jaker/hr

Alih Pemanfaatan LPP RRI Cimanggis Diharapkan Tidak Ganggu Eksistensi RRI

Anggota Komisi I DPR RI berharap alih pemanfaatan lahan LPP RRI di Cimanggis untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) tidak mengganggu eksistensi dari Lembaga Penyiaran Publik itu sendiri. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan LPP RRI, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/03).

“ Kami ingin alih pemanfaatan lahan RRI itu untuk pembangunan UIII tidak mengganggu eksistensi RRI. Artinya jika lahan tersebut ingin digunakan, maka lahan penggantinya harus jelas terlebih dahulu. Jangan sampai sudah dialih manfaatkan tapi kemudian lahan penggantinya tidak dianggarkan, sementara disana ada pemancar yang menyiarkan siaran ke seluruh Indonesia.

Desa Sebagai Subjek Pembangunan

Sebelum Undang-undang Desa diundangkan, desa masih dipandang sebagai obyek pembangunan semata. Sebagai obyek, desa hanya dijadikan bagian dari program-program sektoral. Kadang-kadang program yang datang ke desa dari pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Saat ini desa, melalui UU Desa, yang telah disetujui DPR RI bersama pemerintah telah mengakui desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dan satu kesatuan entitas sosial-politik-budaya yang mandiri.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Legislasi DPR RI Hanafi Rais mendukung dan mendorong penuh desa sebagai subyek pembangunan. "Kita juga ingin mendorong kreativitas lokal dari sisi ekonomi atau pun produksi lokal. Sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari ekonomi lokal tertampung dalam Badan Usaha Milik Desa," ungkap Hanafi saat Sosialisasi UU Desa di Bantul, belum lama ini.

Dalam sosialisasi, dijabarkan UU Desa memosisikan desa sebagai basis sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga perlu diberdayakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. "Maka masyarakat desa mempunyai saluran politik, punya saluran ekonomi, dan ini yang harus dimanfaatkan. Dan semua kebijakan desa masyarakat harus dilibatkan, ini untuk menjaga supaya tidak ada kecemburuan pada level desa, dan tentu manfaatnya untuk mereka," papar Hanafi.

Dia juga menyampaikan UU Desa

sifatnya untuk penguatan desa secara kelembagaan dalam struktur pemerintahan. Selain dikuatkan secara struktur juga dikuatkan dengan anggaran, yang tiap desa akan menerima sekitar Rp 1 miliar pada 2017.

"Kita juga ingin m a j u k a n kemakmuran desa. Sehingga dengan adanya tambahan anggaran dari pusat maupun anggaran yang lain, kita ingin kepala desa itu punya dampak langsung bahwa dana ini untuk kemakmuran masyarakat desa," ungkap Hanafi.

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini, menambahkan, BUMDes yang diatur dalam UU Desa akan menjadi



Ketua Tim Kunspek Baleg DPR RI, Hanafi Rais

badan usaha milik masyarakat desa secara bersama. "Sehingga kemudian nanti desa punya keunggulan secara ekonomi, produknya punya unggulan dibanding desa lain. Tujuannya untuk kemakmuran bersama," papar Hanafi. ■

(eko/sc).Foto: eko/hr

Ini bisa berbahaya dan mengganggu publik juga," ujar Anggota Komisi I Bobby Adhito Rizaldy.

Dilanjutkan Bobby, hal itu sejatinya merupakan kewenangan mutlak dari pemerintah. Karena yang dialih pemanfaatannya juga merupakan tanah negara dan untuk negara juga. Namun mengingat LPP RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang notabene berhubungan langsung dengan

publik atau masyarakat luas, maka menjadi tanggung jawab Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja LPP RRI untuk memastikan bahwa stasiun radio pertama di Indonesia dapat terus eksis menjalankan seluruh program dan rencananya.

Dengan kata lain, Komisi I DPR RI berharap pemerintah mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait dan menyampaikannya kembali pada Komisi I Komisi DPR RI sebelum alih pemanfaatan lahan RRI itu berlangsung. ■

(ayu/sc).Foto: Mulya/hr



Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhito Rizaldy

Komisi X DPR RI Pertanyakan Pengurangan Anggaran AG 2018

Komisi X DPR RI mempertanyakan pengurangan jumlah cabang olahraga *Asian Games* 2018 dari 42 cabang menjadi 36 cabang kepada *Indonesian Asian Games Organizing Committee* (INASGOC) selaku Panitia Penyelenggara *Asian Games*. Selain itu, Komisi X DPR RI juga meminta penjelasan pemotongan anggaran dalam pelaksanaan AG 2018.

Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya usai RDPD dengan Ketua Umum KOI sekaligus Presiden INASGOC, Erick Thohir beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/03). Pemotongan anggaran itu cukup signifikan, dari usulan anggaran sebesar Rp8,7 triliun, hanya disetujui sekitar Rp4 triliun.

"Pengurangan anggaran tentu dapat dipahami oleh Komisi X DPR RI, bila ini dampaknya memang sudah diperhitungkan Pemerintah. Kalau ini untuk efisiensi, tentu kita dukung penuh. Namun, apakah dengan pengurangan ini berdampak pada penyelenggaraan maupun prestasi. Tentu kita juga harus *fair*, berarti ekspektasi prestasi di *Asian Games* harus disesuaikan," kata Riefky.

Politisi F-PD itu pun menilai, jika anggaran pelaksanaan *Asian Games* mengalami pemotongan, berarti harus ada beberapa penyesuaian, seperti target perolehan medali, hingga waktu persiapan *venue*. Terkait anggaran ini, Komisi X DPR RI juga berencana mendengar langsung dari Ketua Tim Panitia Pengarah *Asian Games* yang dijabat oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

"Kami juga ingin mendengar secara langsung dari Ketua Tim Panitia Pengarah *Asian Games* terkait pemotongan cabang olahraga yang bermuara pada efisiensi anggaran. Dan konsekuensi pemotongan anggaran penyelenggaraan *Asian Games* terhadap kualitas penyelenggaraan dan prestasi olahraga Indonesia sebagai tuan rumah," jelas Riefky.

Komisi X DPR RI akan menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk menggelar



Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya

rapat konsultasi dengan Ketua Tim Panitia Pengarah. Selain itu, tambah Riefky, pihaknya juga meminta rincian mekanisme penghitungan awal pendanaan *Asian Games*.

"Karena ketika anggaran dipotong, INASGOC menyetujui. Padahal, jadi tuan rumah itu tentu mengeluarkan biaya yang tinggi jika ingin penyelenggaraan berkualitas," imbuh politisi asal dapil Aceh itu.

Riefky menambahkan, Komisi X DPR RI juga meminta kepastian anggaran penyelenggaraan *Asian Games*, karena pihaknya menerima keluhan dari KOI, yang anggaran belum turun. Padahal, waktu penyelenggaraan sudah semakin dekat. INASGOC pun diminta untuk menyampaikan rincian laporan keuangan kegiatan kampanye *Asian Games* 2018 sebesar 15 juta dolar AS dan biaya penyiaran sebesar 30 juta dolar AS yang telah ditransfer kepada OCA.

"Kami juga meminta INASGOC untuk menyampaikan usulan kebutuhan dana pada 2017 dan 2018, termasuk dasar perhitungan, rasionalitas perencanaan pendanaan, dan indikator capaian target," tutup Riefky.

Sebelumnya, Presiden INASGOC Erick Thohir menjelaskan, pengurangan cabang dimaksudkan untuk meminimalisir anggaran dan memaksimalkan potensi prestasi yang bisa diraih Indonesia. Efisiensi itu juga disarankan Wapres Jusuf Kalla dari semula 42 cabang menjadi 36.

Gagasan itu muncul setelah Wapres ditunjuk menjabat sebagai Ketua Pengarah *Asian Games* pada 15 Maret lalu. Namun, menurut Erick, jumlah itu juga masih belum dapat dipastikan. Pasalnya, pengurangan cabang itu belum mendapat persetujuan dari Dewan Olimpiade Asia (OCA).

"Cabang yang dikurangi yang tidak potensi medali, cabang yang berbiaya mahal, *cost*, dan cabang yang terkenal seperti cabang kabadi dari India dan *non* olimpik dan tidak terkenal," jelas Erick.

Sementara terkait anggaran, Erick menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pengurangan dari anggaran *test event* dengan menanggalkan nama *Asian Youth Games* (AYG) yang bisa menghabiskan dana hingga Rp1 triliun. Hasilnya, hanya akan ada 10 cabang yang akan tampil di *test event* dan mampu menekan biaya sampai Rp400-500 juta.

"Dana untuk upacara pembukaan dan penutupan dari 85 juta dolar AS kami kurangi menjadi 39-40 juta dolar AS sudah termasuk rangkaian acaranya. *Broadcasting* dan IT juga hanya 70 persen yang *live* kalau ada pengurangan cabang nantinya," papar Erick.

Sementara untuk pemotongan usulan anggaran pelaksanaan *Asian Games* yang hanya disetujui sebesar Rp4 triliun, imbas dari efisiensi anggaran, Erick memastikan pihaknya akan menyusun ulang anggaran yang diperlukan. ■



Kenaikan BPIH Diiringi dengan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Haji

Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher Parasong menilai kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini sebesar 249.008 rupiah sesuai dengan biaya peningkatan kualitas pelayanan yang akan dirasakan oleh para calon Jemaah haji mendatang. Hal tersebut diungkapkannya sesaat setelah rapat kerja dengan Menteri Agama di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/03).



Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama

“BPIH tahun ini sebesar Rp34.890.312 sementara tahun lalu sebesar Rp34.641.304, jadi naik sebesar Rp249.008 atau sekitar 0,72 persen. Namun kenaikan itu tidak sebanding dengan peningkatan 25 item pelayanan ibadah haji yang akan diterima Jemaah. Investasi yang dibangun lebih besar dibanding kenaikan BPIH. Misalnya kenaikan sebesar Rp249.008,

sementara investasi untuk tenda saja Rp210 ribu per orang. Belum investasi komponen lainnya,” jelas Ali.

Tenda, lanjut Ali, pihaknya bersama dengan Kementerian Agama telah sepakat mengganti semua tenda yang ada dengan tenda kualitas lebih baik dan lebih besar yang mampu menampung 35-40 jemaah calon haji. Jumlahnya pun ditambah menjadi

5350 buah tenda. Di dalam tenda di Arafah pun dilengkapi dengan *air cooler*, dan kipas angin yang membuat Jemaah menjadi lebih nyaman lagi.

Tidak hanya itu, lanjut Ali, kenaikan BPIH itu juga mempertimbangkan *factor* inflasi, kenaikan harga avtur walaupun hanya 11 sen, namun tidak tertutup kemungkinan pada bulan September mendatang akan kembali meningkat. Frekuensi makan jemaah pun akan ditingkatkan menjadi 25 kali untuk di Mekkah dan 18 kali untuk di Madinah.

“Jadi, itu semua sudah kami perjuangkan bersama agar Jemaah Haji Indonesia tetap nyaman dan khushyu beribadah,” tambah politisi dari Fraksi PAN ini.

Terkait dengan santunan terhadap keluarga korban jatuhnya *crane* pada tahun sebelumnya yang belum juga mendapatkan haknya, Ali mengatakan bahwa sebagaimana fungsi pengawasan yang melekat pada DPR RI dalam hal ini Komisi VIII DPR RI, pihaknya akan terus mendorong pemerintah (Kementerian Agama) untuk menindaklanjutinya dan mempertanyakannya kepada Pemerintah Saudi. Ia berharap ke depan semua hak yang dijanjikan oleh Pemerintah Saudi dapat segera diselesaikan. ■

(Ayu) / Foto: Rodi/hr



Dokter Spesialis Wajib Ikut Program WKDS

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar dipimpin Syamsul Bachri dan didampingi 7 orang Anggota.

Mereka diterima langsung oleh Rektor, Dekan, Ketua Program Studi Program Dokter Spesialis Univ. Hasanuddin, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Pengurus Daerah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prov. Sulsel dan dari Kementerian Kesehatan RI. Jumat (24/3).

Anggota Tim, Aliyah Mustika Ilham (FPD) mengatakan, kunjungan tersebut guna meninjau kesiapan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam rangka menyukseskan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

Menurutnya, Pemerintah mencanangkan program tersebut sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan distribusi dokter spesialis yang tidak merata. Dari program ini diharapkan terjadi peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menyukseskan program ini, maka setiap institusi pendidikan program dokter spesialis mendapat tugas menyiapkan mahasiswa program dokter spesialis yang akan menjadi peserta WKDS.

Dijelaskan pula, setiap dokter spesialis lulusan perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti WKSD paling singkat 1 tahun. "Peserta WKDS ditempatkan pada rumah sakit terpencil, perbatasan dan kepulauan atau Rumah sakit Rujukan regional/provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Mereka pun berhak mendapat hak dan tunjangan dari Pemerintah pusat dan daerah," ujar Aliyah.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Andi Asadul Islam, mewakili Rektor Unhas, menyambut baik upaya pemerintah mencanangkan program WKDS. Penyebaran tenaga dokter spesialis diakui memang selalu menjadi masalah dalam pemerataan di sejumlah wilayah terutama lokasi terpencil. Dalam setahun, Unhas meluluskan sekitar 200an dokter spesialis.



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI mengunjungi FK Universitas Hasanuddin, Makassar

Jika diakumulasikan dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya, maka dalam setahun Sulsel bisa mencetak ribuan tenaga.

Namun masih saja Indonesia kekurangan SDM dan sebagian besar memilih mengabdikan di kota besar. "Kami menyambut baik program pemerintah pusat ini. Namun perlu diketahui selama ini kami tidak memiliki kewenangan

mengatur dimana lulusan kami bisa ditempatkan, cuma merekomendasikan saja," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Rachmat Latief, mengatakan pihaknya telah menyiapkan empat Rumah Sakit (RS) untuk menyukseskan program tersebut. Ke empat Rumah sakit tersebut tersebar di Sulsel seperti di Palopo, Pinrang, Soppeng dan Bulukumba. "Kami Pemerintah Sulsel menyambut baik ini, siap menerima dan siap rumah sakitnya, siap juga insentifnya. Pasca wajib kerja kami berharap mereka mau jadi tenaga tetap disana. Dan rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan kepada Kementerian Kesehatan untuk peningkatan pelaksanaan Program WKDS.

Ikut serta dalam Kunspek ini Ermalena (FPP), Dewi Asmara (FPG), Suir Syam (F Gerindra) Aliyah Mustika Ilham dan Verna Gladiea Merry Inkiriwang (FPD) Sitti Masrifah (FPKB) dan Irgan Chairul Mahfiz (FPP). ■

(hrmp)/Foto: Eka/hr

Komisi V DPR RI Serap Usulan Asosiasi Driver Online

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Permenhub nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Semula peraturan tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 01 April 2017, namun ternyata masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, terutama dari berbagai muatan pengaturan yang belum dapat diterima sepenuhnya oleh berbagai pihak yang terkait dengan jasa angkutan orang berbasis *online*.



UU Desa Harus Tetap Dikawal Sehingga Beri Manfaat Masyarakat Desa

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Sleman Arif Wibowo mengatakan, dari data dan informasi yang didapat ada perkembangan positif dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten ini. Dari tahun ketahun serapannya cukup tinggi, pengelolaannya sampai saat ini tidak ada penyelewengan yang muncul, belum ada masalah yang berarti. Meski demikian, pihaknya akan terus memantau perkembangannya.

Hal itu dikemukakannya Jumat (24/03) lalu saat melakukan sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Bupati Sleman Sri Purnomo dan jajaran serta para kepala desa. Sosialisasi ini juga melibatkan jajaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Politisi dari PDIP ini berharap, pada tahun-tahun berikutnya hal yang sama terjadi secara konstan, berkelanjutan dimana tidak ada penyelewengan. Untuk itu jajaran Kemendes dan jajaran

Kementerian terkait untuk sama-sama melakukan pengawasan. "Sama-sama melakukan supervisi, pengawalan agar pelaksanaan UU desa ini betul-betul memberikan manfaat sesuai dengan tujuan di bentuknya UU ini," tekan Bowo sapaan Arif Wibowo.

Terkait dengan Badan Usaha Milik Desa



Tim Kunspek Baleg DPR RI di Kabupaten Sleman, DIY

(BUMDes) yang merupakan salah satu yang amanah yang termaktub dalam UU Desa, Sleman menjadi salah satu tujuan dimana desa-desanya sudah menginisiasi tentang pembentukan BUMDes yang sekarang sedang tumbuh.

"Kita sudah kunjungi ada prospek yang baik dan inspiratif, tentu saja membutuhkan

dukungan berbagai aspek agar BUMdes Desa Bendowo Harjo bisa berkembang lebih baik dan menjadi contoh desa lain," harapnya.

Pelaksanaan atas UU Desa ini, khususnya dalam pembentukan BUMDes akan terbukti jika ada *political will* tidak saja dari kepala desa dan perangkatnya tetapi semua unsur masyarakat di desa itu dalam mendukung lembaga keuangan desa tersebut, yang dapat memberikan dua aspek sekaligus.

"Aspek ekonomi dalam hal ini mendatangkan profit, berkontribusi terhadap kemajuan pertumbuhan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu berkontribusi pada kehidupan sosial masyarakat desa, jadi kepentingannya adalah memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat desa," kata Arif Wibowo menambahkan. ■

Foto: Arel/Inf

Oleh karenanya Komisi V DPR RI menggelar audiensi untuk mendapatkan masukan dan usulan dari Asosiasi *Driver Online* (ADO), mengenai hal-hal yang mungkin menjadi persoalan atau permasalahan dalam pengoperasian jasa angkutan orang berbasis *online* kedepannya.

"Berbagai masukan dan usulan tersebut tentu akan dibicarakan dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk menjadi regulator disektor transportasi," ucap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/03).

Menurut Fary, Ada lima catatan yang sudah ditampung berdasarkan hasil RDPU tersebut, yakni berkaitan dengan dorongan untuk segera dilakukan pengimplementasian

Permenhub 32 Tahun 2016, kemudian mengenai berbagai input atau masukan yang menyangkut tentang bagaimana aturan bagi kendaraan roda dua, karena hal itu belum diatur dalam undang-undang tetapi menjadi kebutuhan dilapangan.

"Selain itu tentang item-item yang menyangkut dengan hubungan *win-win solution* antara *driver* dengan pengelola *online*. Kita juga akan mengagendakan untuk bertemu dengan para pengelola, baik *online* maupun konvensional, sehingga tidak hanya dibawah yang kompak, tetapi kita juga harapkan pihak yang diatas juga mendukung. Dan ujungnya adalah bagaimana supaya masyarakat tidak merasa dirugikan," pungkasnya. ■

Depot/Inf / Foto: Arel/Inf



Pimpinan Komisi V DPR RI bersama Asosiasi Driver Online

DPR RI Berharap *Output* Energi Panas Bumi PT. Geo Panas Energi Meningkat



Tim Kunspek Komisi XI DPR RI mengunjungi PT Geo Dipa Energi di Dieng, Jawa Tengah

Dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas energi panas bumi, Komisi XI DPR RI mendorong PT. Geo Dipa Energi untuk terus memaksimalkan kinerjanya. Dengan kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan *output* energi panas bumi yang dihasilkan PT. Geo Dipa Energi.

PT. Geo Dipa Energi (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). PT. Geo Dipa Energi (Persero) saat ini mengelola lapangan panas bumi Dieng dan Patuha dari sisi hulu (upstream) hingga sisi hilir (down stream).

"Tentunya dengan adanya peningkatan *output* produksi diharapkan bisa memberikan penyebaran dan pemerataan energi panas bumi. Dimana hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan penyebaran dan pemerataan terhadap energi panas bumi khususnya wilayah Jawa, Bali dan Madura," kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng saat mengunjungi PT. Geo Dipa Energi di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (24/03).

Ia berharap PT. Geo Dipa Energi dapat *recovery* kerugian yang terdahulu dan mengoptimalkan *output* yang ada hingga 400 MW agar bisa terus *supply* kebutuhan di Jawa, Bali dan Madura.

Energi yang diproduksi PT. Geo Dipa Energi, lanjut Ketua Komisi XI DPR RI ini, belum sampai angka maksimal. Dengan luas lahan 132,90 Ha, saat ini PT. Geo Dipa Energi sudah memiliki sumur produksi sebanyak 7 sumur dan sumur injeksi sebanyak 11 sumur. Namun saat ini PT. Geo Dipa Energi belum mencapai target karena

hanya dapat memproduksi hingga 60 MW, padahal kegiatan panas bumi yang berada di Dieng tersebut berpotensi hingga 400 MW.

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta PT. Geo Dipa Energi untuk fokus melakukan strategi efisiensi etos kerja dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada agar dapat bergerak lebih lincah dan berkembang pesat.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi Riki Firmanda Ibrahim menjelaskan bahwa ada beberapa hal penting demi meningkatkan pencapaian energi panas bumi yaitu penyelesaian kasus hukum dengan Bumigas, penyempurnaan Permen ESDM Nomor 10 dan Nomor 12 tahun 2017 dan dukungan Pemerintah Daerah terkait penjagaan asset Obvitnas.

"Kami juga berharap ada penegasan status perpajakan PT. Geo Dipa Energi melalui peraturan Menteri Keuangan dan menghapus nama PT. Geo Dipa Energi di dalam PMK No.177/PMK.011/2017 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi," tegas Riki.

Turut serta dalam kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI ke Dieng, Jawa Tengah antara lain Kardaya Wanirka, M. Prakosa, Isma Yatun, Muhammad Nur Purnamasidi, Willgo Zainar, Rooslinda, Sukiman, Bertu Marlas, Krisna Mukti, Ecky Awal Mucharam, Elviana, dan Ferry Kase. ■

(lay/so) / Foto: Jayadi/hr



Irtama Setjen DPR RI Bertekad Wujudkan *Good and Clean Governance*

Inspektorat Utama (Irtama), Sekretariat Jenderal DPR RI bertekad mewujudkan misi *Good Governance and Clean Governance* (tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih) di lingkungan Setjen DPR RI. Hal tersebut diungkapkan Inspektur Utama (Irtama) Setyanta Nugraha usai meluncurkan *website* Inspektorat Utama Irtama.go.id di Gedung DPR RI, Jumat, (24/03).

Menurut pria yang akrab disapa Toto ini, sosialisasi yang dilakukan untuk membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Secara kelembagaan kita sudah meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan sebanyak delapan kali.

Fungsi layanan *website* Inspektorat Jenderal yang baru diluncurkan ini diharapkan bisa membantu dan membuka ruang publik untuk menginformasikan dan menyosialisasikan kegiatan Irtama terutama terkait pelayanan publik. Selain itu, membantu para pejabat dan pegawai untuk mengetahui adanya pelanggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Informasi tersebut bisa didapat dengan

mengakses *web* tersebut di atas.

Bahkan, Irtama juga mengembangkan informasi *whistleblowing system* (WBS), layanan yang berupa pengaduan secara *online* yang dijamin kerahasiaannya. Layanan ini, lanjut Toto, melingkupi pula informasi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Diharapkan dari aduan itu akan mendapat masukan yang konstruktif. Adapun syarat dalam pengisian aduan WBS harus jelas siapa yang mengadukan dan siapa yang diadukan.

Bila pengaduannya menyangkut uang harus ada kejelasan berapa nilai uangnya dan bukti-bukti pelanggaran langsung bisa *upload* di *website* Irtama. "Setelah itu, kita akan lakukan verifikasi, menelaah, dan kemudian hasilnya akan diajukan ke Setjen untuk ditindaklanjuti secara intern



Irtama Setjen DPR RI, Setyanta Nugraha

atau ke aparat penegak hukum," jelasnya.

Ditambahkan, ada pula layanan LHKPN untuk membantu para pejabat melaporkan kekayaannya secara online. Sementara penanganan gratifikasi, papar Toto, tidak hanya uang, barang, dan jasa. Ini semua sudah dijelaskan secara rinci di *web* tersebut. ■

(mb).Foto: Mulya/hr

Komisi IX DPR RI Tinjau USU Terkait Wajib Kerja Dokter Spesialis

Dalam rangka mempersiapkan dokter spesialis yang akan melaksanakan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDP), Komisi IX DPR RI meninjau Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Sumatera Utara, Jumat (24/03).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang memimpin tim kunjungan spesifik ke USU tersebut, menjelaskan Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI ini secara khusus untuk meneliti dan melihat secara langsung program Pemerintah yang terkait dengan program yang disebut WKDS.

"Ini (WKDS) adalah amanat dari Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2017 dan ini baru diberlakukan, tentunya karena sifatnya yang harus segera diberlakukan dan diterapkan, maka tentu kita harus memeriksa dulu fakultas-fakultas kedokteran yang dianggap sebagai suplayer ataupun penyedia tenaga-tenaga kesehatan yang ahli atau spesialis ini," katanya.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dengan Civitas Akademika USU di Medan

Menurut Saleh, dari hasil pertemuan ini komisi IX DPR RI sudah menemukan masukan dari pihak kampus khususnya fakultas kedokteran. Pada prinsipnya mereka setiap untuk melaksanakan program ini dan mengerjakannya sebagaimana yang diminta oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi mereka tetap juga memiliki saran dan masukan terutama terkait dengan tingkat kesejahteraan para dokter spesialis nanti ketika diturunkan ke daerah-daerah.

"Mereka ingin ada kepastian bahwa dokter-dokter tersebut honor yang dijadikan antara 23 sampai 30 juta perbulan itu tidak tersendat-sendat atau tidak terbengkalai, karena ada pengalaman dimana dokter - dokter *internship* sekarang yang dipakai ataupun diprogramkan oleh pemerintah dalam hal ini

Kementerian Kesehatan seringkali anggarannya sering terlambat. Ini akan kami sampaikan kepada Menteri Kesehatan agar ini betul-betul diperhatikan," katanya.

Berikutnya, Komisi IX DPR RI temukan pada wilayah provinsi Sumatera Utara terdapat 80 rumah sakit yang tahun ini akan mendapat bantuan Program WKDP. Di Sumatera Utara, Ada beberapa kabupaten kota yang akan menerima dokter - dokter spesialis ini. Diantaranya Rumah Sakit kabupaten kota yang disebut oleh Kementerian Kesehatan mulai dari Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padangsidempuan, Labuhan Batu Raya.

"Mudah-mudahan itu akan menjadi *pilot project* dari WKDS ini. Dan tentu kami akan memeriksa lanjutan dari sini setelah ini

diterjukkan tentu kami akan memeriksa lagi kira-kira Bagaimana hasil daripada program WKDS ini," ujarnya.

Komisi IX DPR RI berharap program wajib kerja dokter spesialis ini dapat menjawab tantangan dimana ada banyak daerah-daerah Indonesia yang belum mendapatkan dokter spesialis sebagaimana semestinya. Pemerataan dan distribusi dokter-dokter spesialis ini diharapkan bisa berkeadilan, sehingga bisa mendukung program kesehatan nasional yang diprogramkan oleh Pemerintah.

"Dan mudah-mudahan kepada mereka yang nanti ditunjuk untuk menjadi dokter spesialis yang ditetapkan di daerah - daerah itu bisa menjadi pengabdian yang bermanfaat untuk masyarakat luas," ujarnya. ■

(as/sc) / Foto: Agung/hr

Komisi IX DPR RI Dorong Pemerataan Dokter Spesialis

Pemerintah mencanangkan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan distribusi dokter spesialis dengan mengundang Perpres No 4 Tahun 2017 tentang WKDS. Salah satu pertimbangan utama program ini adalah untuk peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, maka upaya pemerataan dokter spesialis dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia melalui WKDS sebagai bentuk pengabdian kepada negara guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Demikian hal ini diungkapkan Ketua Tim Kunspek Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi kepada wartawan usai pertemuan di Universitas Airlangga, Surabaya, Jum'at (24/03) lalu.

Menurutnya, dengan adanya program WKDS ini, peserta WKDS ditempatkan pada rumah sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan atau rumah sakit rujukan regional/provinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan peserta WKDS berhak mendapatkan tunjangan dari Pemerintah Pusat dan insentif dari Pemerintah Daerah.

Politisi asal Dapil Jabar II ini, mengatakan, dokter spesialis saat ini terpusat di perkotaan dan sangat minim di daerah-daerah terpencil. Penempatan dokter spesialis di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah ditunjang dengan insentif tinggi.



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf dengan Civitas Akademika Universitas Airlangga

"WKDS diberikan tunjangan. Pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam rentang Rp23 - Rp30 juta per bulan disesuaikan dengan wilayah kerja penempatan dokter spesialis," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kadinkes Jatim, Kohar Hari Santoso mengakui pemerataan dokter spesialis di Jatim belum menyebar

dengan maksimal. "Dokter spesialis di Jatim belum merata di berbagai daerah karena ada daerah belum terjangkau. Memang distribusi dokter spesialis sekarang ini berfokus pada daerah yang potensial perputaran ekonomi besar," ujar Kohar.

Masalah kesejahteraan masih perlu menjadi perhatian serius. Oleh karena itu Dinkes (Dinas Kesehatan) mengusulkan adanya tambahan kriteria penempatan dokter spesialis.

"Perlu ditambah kriterianya. Sebab ada daerah yang tidak diminati, daerah kekurangan dokter spesialis.

Aspek keamanan juga penting, selain itu juga perlu diatur masa kerjanya," ujarnya.

Kohar mengatakan, sebagai salah satu universitas pencetak tenaga dokter, Unair dinilai Kohar siap berkontribusi dalam menyiapkan dokter kompeten. Namun demikian, peran pemerintah dibutuhkan, termasuk didalamnya bagaimana biaya kuliah dapat dijangkau, tutupnya. ■

(tw)Foto: Iwan/hr

Komisi IV DPR RI Sambangi Pulau C, D, F dan G Pastikan Reklamasi Dihentikan

Tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Edhy Prabowo melakukan peninjauan lapangan ke Pulau C, D, F, dan G proyek Reklamasi Teluk Jakarta, untuk memastikan apakah Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan tugasnya dalam mengawasi dan menghentikan reklamasi.

“ Kita sengaja mengunjungi reklamasi dari Pulau C, D, F dan G guna melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian terkait dalam menghentikan reklamasi, sampai semua syarat dan perizinan teknisnya dipenuhi sesuai dengan perundang-undangan. Kita sudah instruksikan kepada kementerian dalam hal ini KKP dan KLHK, dan setelah kami lihat di lapangan ternyata mereka memang bekerja, dan hal itu kami apresiasi,” ujar Edhy, Jum'at (24/03).

Edhy menilai, setelah dilakukan rapat berkali-kali, Kementerian KP dan LHK telah menunjukkan kerja yang sangat optimal. Belum lama ini ada keputusan pengadilan tentang dimenangkannya gugatan kepada masyarakat, lanjutnya, hal ini sejalan dengan keinginan DPR RI yang sejak awal minta agar reklamasi dihentikan sampai memenuhi syarat perundang-undangan.



Tim Kunjuran Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Edhy Prabowo melakukan peninjauan lapangan ke Pulau C, D, F, dan G proyek Reklamasi Teluk Jakarta

"Kalau pembangunan hanya dilihat dari uang, maka pada jangka panjangnya akan muncul kerugian immateriil lainnya. Untuk apa pembangunan kalau pada akhirnya masyarakat menjadi tersingkirkan. Pada masa itu, penggusuran-penggusuran di sekitar lokasi tersebut semakin banyak terjadi, dan

masyarakat di sekitarnya. "Dalam kunjungan hari ini kita melihat, aktifitas - aktifitas khususnya di Pulau G, dimana pernah berjalan sekitar 30 hektar dan sekarang telah terhenti sama sekali. Di Pulau C dan D, ada tugas-tugas yang telah dilakukan Pemerintah dipulau tersebut, dan sudah mereka laksanakan," ucap Edhy.

kalau ini tidak dihambat penggusuran di mulut-mulut pantai sekitar reklamasi akan terus berlanjut, hal itulah yang tidak kita inginkan," tandasnya.

Edhy mengatakan, DPR RI menginginkan pembangunan yang tersinergi sesuai dengan aturan dan tidak ada yang saling merugikan. Ia menyatakan bahwa DPR RI tidak membenci pengusaha, tetapi pengusaha harus mengikuti aturan dan memikirkan nasib



<http://www.aktual.com>

DPR RI menginginkan pembangunan yang tersinergi sesuai dengan aturan dan tidak ada yang saling merugikan. Ia menyatakan bahwa DPR RI tidak membenci pengusaha, tetapi pengusaha harus mengikuti aturan dan memikirkan nasib masyarakat disekitarnya.

Walaupun tidak kelihatan ada aktifitas tetapi terlihat ada bangunan yang didalamnya ada aktifitas, tambahnya, sebab bagaimana mungkin dari tanah yang berstatus sengketa dan belum jelas izinnya tetapi bisa dibangun. Sementara untuk membangun harus ada izin, padahal status tanahnya masih belum jelas.

Ia juga menjelaskan, salah satu permasalahan yang timbul sebagai dampak dari adanya reklamasi yaitu akses para nelayan menuju ke pelabuhan pelelangan ikan menjadi tambah sulit. Padahal cita-cita pembangunan adalah untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik dilihat dari seluruh aspek, bukan hanya dilihat dari sisi investasinya saja.

"Kita ingin ini dihentikan total dahulu, sampai semuanya jelas. Yang kita inginkan agar bisa kondusif, dan saling menguntungkan. Satu tahun setelah kita memberikan perintah penghentian, namun pengurusan secara masif masih terjadi. Kalau kita bicara reklamasi secara umum, maka tidak ada yang haram dalam reklamasi, selama aturannya dilaksanakan secara teknis sesuai undang-undang. Kita tidak ingin berpolitik dan bersandiwara, kita mau real sesuai faktanya. "■

(dep). Foto : Eno/hr

Pemanfaatan Energi Panas Bumi Relatif Mahal

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyampaikan pengembangan pemanfaatan teknologi panas bumi masih relatif mahal. Akibatnya, harga listrik dari pembangkit listrik panas bumi lebih mahal jika dibandingkan dengan penggunaan listrik dari energi fosil.

“Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI ingin mencari solusi dengan menteri terkait agar panas bumi ini bisa masuk dalam skema penjualan yang terjangkau oleh masyarakat,” ujar politisi dari F-PAN ini.

Saat ini, sambung Hafisz, sebelumnya harga listrik energi terbarukan mencapai 13 sen dollar per kWh. Namun, dengan adanya green credit dari Jepang dengan bunga setengah persen mampu menekan biaya operational menjadi 11 sen dollar per kWh.

"Ini akan menjadi pembahasan kita bersama pemerintah, siapa tahu kita temukan solusi terbaik, sehingga harga panas bumi menjadi lebih ekonomis, Misalnya, di 8 atau 7 per kWh yang dapat dibeli rakyat," sambungnya.

Menurutnya, untuk mendapatkan angka ideal maka bisa dilakukan dengan cara *cross* subsidi bahan bakar fosil sehingga bisa masuk dalam hitungan skala ekonomi atau komersil.

"Misalnya batu bara biarkan di *mine mouth*, tidak usah dipindah-pindahkan karena akan menjadi *cost* yang dibebankan ke listrik (per kWh). Nah, jika ini kita hindari maka beban transportasi menjadi hilang," jelas politisi dapil Sumatera Selatan ini.

Dalam kunjungannya, politisi dari F-PAN ini juga mendukung kerja sama Pertamina

Geothermal Energy (PGE) dengan Badan Pengkajian dengan Penerapan Teknologi (BPPT). Menurutnya, ini merupakan langkah strategis untuk pengembangan industri di bidang pelistrikan dan teknologi panas bumi.

Sebagaimana diketahui, kerja sama pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) milik PGE itu memanfaatkan uap panas yang terbuang dari PLTP berkapasitas 4 x 20 MW. Dengan teknologi siklus biner asal Jerman, dapat dihasilkan daya listrik tambahan hingga 500 kilowatt.

Dalam kesempatan tersebut, Hafisz juga menyoroti dampak penerimaan negara bukan pajak (PPBP) dari pemanfaatan energi terbarukan ini. Mengingat, Komisi XI DPR RI juga sedang membahas RUU PNBP. "Kita menyikapi PNBP yang terus menurun dalam rangka untuk memberikan untuk optimalisasi penerimaan negara," timpalnya.

Turut serta dalam kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI ke Lahendong, Manado antara lain Jon Erizal (F-PAN), Amir Uskara (F-PPP), dan Donny Imam Priambodo (F-Nasdem). ■

(ann.iso). Foto: Anne/hr



Tim Kunspek Komisi XI DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Bumi di Manado

Baleg DPR RI Apresiasi BUMDes Ponggok Klaten

Dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang Desa di Kabupaten Klaten, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo memimpin Baleg DPR RI meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (24/03).

Bumdes di Desa Ponggok merupakan salah satu desa yang paling berhasil di Jawa Tengah dalam mengelola Bumdes, di mana Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Ponggok sudah mencapai Rp4 miliar per tahun dan ini bahkan melebihi Dana desa yang dikucurkan di setiap desa.

"Dari keterangan Kades Ponggok (Junaedhi Mulyono) bahwa PAD dari Desa Ponggok sudah mencapai Rp4 miliar per tahun dan dari unit kegiatan usahanya satu tahun sudah mencapai Rp10 miliar, artinya dalam setahun dari PAD dan penghasilan Bumdes hampir mencapai Rp14 miliar," ungkap Firman.

Lebih lanjut Firman sampaikan bahwa, jika dibandingkan dengan dana desa yang hanya Rp720 juta, maka itu sangat jauh dari apa yang dihasilkan oleh Desa Ponggok.



Tim Kunspek Baleg DPR RI meninjau BUMDes Ponggok, Klaten

Desa Ponggok awalnya merupakan desa tertinggal yang PAD nya hanya Rp15 juta per tahun, kini PAD nya sudah mencapai Rp 4 miliar per tahun.

"Baru pertama kali ini saya melihat

langsung suatu desa memiliki blue print pembangunan desa, yang mungkin desa lain sangat langka," ungkap Firman.

Firman juga menyampaikan bahwa, pola-pola dan manajemen pembangunan di Desa Ponggok bisa diterapkan di desa-desa lainnya di Indonesia, sehingga potensi pembangunan dan ekonomi akan bergerak dengan sendirinya.

"Yang lebih menarik lagi di sini bahwa masing-masing penduduk sudah memiliki saham sebanyak Rp5 juta, dan Rp5 juta tersebut dalam bentuk kartu (e-money) sehingga transaksi di Desa Ponggok menggunakan online. Selain itu, Desa Ponggok memiliki program, satu rumah satu mahasiswa," terang Firman.

"Harapan kami bahwa, DPR RI bisa menyampaikan ke desa-desa lain saat kunjungan daerah tentang keberhasilan Desa Ponggok, walaupun itu tergantung dari kesiapan aparatur desanya maupun manajemen pembangunan desanya, kesiapan masyarakatnya," terangnya.

Ditambahkan, setiap desa memiliki karakter dan potensi desa yang berbeda-beda, namun sistem dan manajemen pengelolaan di Desa Ponggok bisa dijadikan sebagai rujukan dalam membangun desa. ■

(skrmp)/Foto: Singgih/hr

Mahasiswa Diharapkan Berani Masuk Politik

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyerukan kepada mahasiswa untuk tidak anti terhadap politik, justru ia mendorong agar mahasiswa berani masuk gelanggang dunia politik sejak dini, hal ini karena mahasiswa adalah agen perubahan sosial yang utama bagi bangsa. Dengan berpolitik, maka semakin besar peluang untuk melakukan perubahan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Hal itu dipaparkan didepan ratusan mahasiswa dan civitas akademika Universitas Islam Blitar dalam acara BKSAP Day yang bertajuk 'Tentang BKSAP dan Diplomasi Parlemen,' pada Kamis, (23/03) di Auditorium Universitas Islam Blitar, Jawa Timur.

Bahkan, Politisi Partai Demokrat ini menegaskan kepada seluruh mahasiswa

yang hadir untuk tidak ragu untuk bercita-cita menjadi Anggota DPR RI. "Mahasiswa dididik untuk merubah keadaan sosial. Jangan ragu bercita-cita menjadi Anggota DPR RI," tegas Nurhayati yang kemudian diiringi tepuk tangan para hadirin.

Tak hanya mendorong mahasiswa untuk tidak ragu mengggluti dunia politik, dalam kesempatan tersebut, Nurhayati juga

menjelaskan terkait tugas dan peranan BKSAP dalam menjalankan amanatnya dalam diplomasi parlemen guna memajukan kepentingan nasional. "Dalam sidang-sidang di organisasi internasional maupun regional, BKSAP telah berjuang menginisiasi sejumlah resolusi dan deklarasi untuk kepentingan nasional," tutur Nurhayati.

Terkait dukungan BKSAP terhadap



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf foto bersama mahasiswa Universitas Islam, Blitar

kemerdekaan Palestina juga menjadi paparan Nurhayati yang kemudian menarik perhatian para mahasiswa. "Tak hanya itu, dalam

sidang internasional, BKSAP menunjukkan posisi solidaritas dan dukungan kepada negara muslim seperti kemerdekaan Palestina, Rohingya dan lain-lain, selain itu juga isu tenaga kerja Indonesia," jelasnya.

Beberapa perjuangan dan dukungan BKSAP terhadap isu-isu internasional dipaparkan guna menaruh pesan bahwa berpolitik menjadi hal penting guna memperjuangkan

kepentingan bangsa dan negara. Nurhayati pun lalu mengkritik paham apatisisme politik yang disebutnya menyesatkan dan tidak sesuai dengan jati diri mahasiswa sebagai agen perubahan sosial politik.

Nurhayati menegaskan, dengan berani masuk dalam gelanggang politik, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan perubahan demi kepentingan bangsa dan negara. "Oleh karenanya, saya luruskan pemahaman mahasiswa akan politik, politik adalah perjuangan mulia memperbaiki nasib bangsa," pungkas Nurhayati. ■

(hs), foto : dok BKSAP/hr

Karena Potensial Peyimpangan Fokus Sosialisasi UU Desa Terkait Tata Kelola Keuangan

Wakil Ketua Baleg DPR RI Dossy Iskandar Prasetyo mengharapkan UU Desa perlu terus disosialisasikan kepada para perangkat desa termasuk peran serta masyarakat. Hal itu dimaksudkan sebagai penguatan kepada desa sebagai unsur strategis pembangunan daerah. Sosialisasi bersama pejabat Kementerian Desa dan BPKP difokuskan pada tata kelola keuangan. Karena ini merupakan sumber potensial bagi terjadinya ketidakberesan dalam penggunaan dana bantuan desa.

Demikian ditegaskannya se usai melakukan sosialisasi UU Desa di Wonogiri, Jateng, Jumat (24/03) lalu. Hadir dalam acara ini Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan jajarannya serta ratusan kepala desa sekabupaten tersebut.

Untuk itu lanjut Dossy, Tim Baleg sangat berterima kasih kepada Bupati Wonogiri atas fasilitas yang diberikan dalam acara sosialisasi ini. Wonogiri dipilih karena cukup berhasil dalam penggunaan dana desa dan kebetulan Kemendes akan menyerahkan proyek desa

tertinggal sebagai bagian desa percontohan dan ini sinkron dengan tujuan pelaksanaan UU Desa.

Dalam dialog termasuk keluhan aparat kelurahan, Pimpinan Baleg dari Fraksi Hanura ini menyimpulkan harapan mereka untuk menghilangkan kesan ada diskriminasi. Tapi intinya Baleg berpikir tentang desa, sebab kelurahan sudah merupakan perangkat Kabupaten/kota." Apa yang disampaikan merupakan aspirasi yang akan direspon dengan baik," terang Dossy.

Sementara itu, Bupati Joko Sutopo mengatakan, Wonogiri ada 251 desa, dengan sosialisasi Baleg bersama Kemendes dan BPKP maka akan mendapatkan pemahaman baru bahwa UU Desa ini adalah strategis manakala dikelola sesuai azas manfaat dan ketentuan yang ditetapkan. Makanya untuk meminimalisir dan jangan sampai terjadi penyimpangan dalam konteks perencanaan, penggunaan sampai pertanggungjawaban dana desa maka momentum sekarang ini adalah yang sangat penting dan berdampak positif untuk suksesi seluruh program yang

bersumber dari dana desa.

Atas pertanyaan apakah ada pejabat atau kades yang masuk ranah hukum atas penggunaan dana desa ini, Bupati Wonogiri menegaskan, di daerahnya belum ada. Pihaknya selalu berkoordinasi aktif dengan seluruh perangkat terkait termasuk dengan inspektorat terhadap monitoring penggunaan dana desa.

"Alhamdulillah di tahun ketiga ini Wonogiri klir dari penyimpangan dan ke depan akan kami tingkatkan salah satu upaya tambahan materi dari sosialisasi Baleg DPR RI ini," jelasnya.

Terkait dengan BUMDes, Bupati Sutopo menjelaskan, dari 251 desa sudah terbentuk 53 BUMDes dan 54 dalam proses, artinya akan terus didorong. Sebab salah satu implementasi dari UU Dana Desa adalah memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi melalui wadah BUMDes. Makanya desa-desa lain akan didorong, difasilitasi dan pemerintah akan hadir melakukan monitoring, memberikan pelatihan agar UU Desa diimplementasi dengan baik. ■

(mp), Foto: Kresno/hr



Ketua Tim Kunspek Baleg DPR RI ke Wonogiri, Dossy Iskandar Prasetyo

Kemenaker Diminta Tingkatkan Pelayanan Pekerja Migran

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) perlu meningkatkan pelayanan terhadap pekerja migran dengan mengembangkan infrastruktur di desa migran produktif. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Kemenaker, Senin (27/03) lalu.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh P Daulay

penempatan tenaga kerja Indonesia non-prosedural yang masih terjadi hingga saat ini, pihaknya mendesak Kemenaker untuk menyelesaikan MoU penempatan dan perlindungan TKI ke Timur Tengah.

Di sisi lain, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjalankan komitmen Deklarasi G20 bidang ketenagakerjaan, sehingga seluruh substansi pokok dalam deklarasi

tersebut dapat dimanfaatkan bagi pekerja pada tahun 2025.

"Substansi pokok dalam deklarasi tersebut antara lain, tenaga kerja muda dan tenaga kerja muda yang beresiko tidak terserap dalam pasar kerja secara permanen, revitalisasi, rebranding dan reorientasi BLK," ungkapnya.

Komisi IX DPR RI juga menyampaikan aspirasi atas penyerapan anggaran Tahun 2016 dan meminta Kemenaker untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkorelasi dengan penyerapan anggaran sehingga dapat dimaksimalkan terutama untuk program yang lebih berpihak kepada rakyat di daerah. ■

(ria.mpi) / Foto: Mulya/hr

Saleh menjelaskan, yang perlu di tingkatkan antara lain teknologi informasi terutama informasi permintaan kerja yang mudah diakses oleh masyarakat pada masa pra penempatan dan purna penempatan.

Pihaknya juga meminta Kemenaker membuat *roadmap* dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, untuk menciptakan tenaga kerja yang beketramampilan sesuai dengan kebutuhan (*link& match - Demand Driven*).

"Untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi itu, kita minta Kemenaker untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Perindustrian," tegas politisi F-PAN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sementara untuk meningkatkan pengawasan termasuk menindak pelaku

Sekjen DPR RI Bahas Mekanisme Kerja Bamus dengan DPRD Banjarmasin

Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned di damping Deputi Persidangan Damayanti menerima kunjungan beberapa Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/03) dibahas mengenai mekanisme kerja Bamus, baik di DPR RI maupun DPRD.

“Kedatangan mereka menanyakan mengenai mekanisme kerja Bamus di DPR RI baik dalam masa persidangan maupun masa reses. Memang pada dasarnya tugas dan fungsi DPR RI dan DPRD hampir sama, namun ada sedikit perbedaan,” kata Maya sapaan akrab Deputi Persidangan DPR RI. Maya menjelaskan, ada sedikit perbedaan dalam keanggotaan Bamus di DPR RI maupun DPRD. Untuk DPR RI, keanggotaan Bamus

DPRD Probolinggo Konsultasi Raperda Ke BKD DPR RI

Kepala Badan Keahlian DPR RI (BKD) Johnson Rajagukguk menerima kunjungan DPRD Probolinggo di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/03). Dalam pertemuan tersebut, DPRD Probolinggo melakukan konsultasi mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan Peraturan Daerah (Raperda).

“ Mereka ingin mengetahui bagaimana mekanisme dan tata cara pembentukan Rancangan undang-undang di DPR RI sebagai suatu perbandingan dalam penyusunan Raperda nantinya. Agar produk legislasi yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan tidak memakan waktu lama,” kata Johnson usai menerima DPRD Probolinggo.

Lanjut Johnson menjelaskan, dirinya sudah menyampaikan beberapa hal mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan RUU di DPR RI, yang belum tentu relevan jika di aplikasikan dalam penyusunan Raperda karena ada beberapa perbedaan antara DPR RI dan DPRD.

Ia mencontohkan mengenai adanya Panitia Kerja (Panja) di DPR RI yang dibentuk untuk mengefektifkan pembahasan supaya lebih mendalam dengan jumlah yang lebih



Kepala BKD DPR RI Johnson Rajagukguk dengan Pimpinan DPRD Probolinggo

professional, yaitu separuh dari jumlah anggota yang ada di Komisi. Sementara di DPRD jika dibentuk Panja tidak akan relevan sebab jumlah anggotanya sembilan.

“Di daerah tidak perlu dibentuk Panja, karena jumlah anggotanya hanya sedikit, saya khawatir nanti itu justru tidak efektif dan

memakan waktu lama. Maka dari itu saya sampaikan, mekanisme dan tata cara pembuatan Raperda harus disesuaikan dengan kondisi di dalam DPRDnya sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Ketua Delegasi kunjungan DPRD Probolinggo, Zulfikar Imawan, yang tak lain adalah Wakil Ketua DPRD, menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKD DPR RI yang

telah memberikan banyak pemahaman mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan RUU di DPR RI untuk di aplikasikan dalam pembentukan Raperda. “Semua yang kami terima hari ini, akan kami sinkronisasikan sesuai dengan kondisi DPRD di Probolinggo,” katanya. ■

(ria), Foto: Azika/hr

merupakan unsur dari pimpinan fraksi. Sementara untuk DPRD, keanggotaan Bamus tidak harus pimpinan fraksi. Namun untuk Pimpinan Bamus DPRD, harus Pimpinan DPRD.

“Dengan mekanisme keanggotaan yang berbeda, kadang kebijakan yang sudah ditentukan oleh Bamus DPRD, perubahannya hanya bisa dilakukan oleh Pimpinan Fraksi. Kalau di DPR RI, perubahan yang diambil oleh Bamus, harus dilaksanakan oleh Komisi atau rapat konsultasi Pimpinan Dewan pengganti Bamus,” jelasnya.

Perbedaan lainnya, lanjut Maya, kalau Bamus DPR RI tidak ada Kunjungan Kerja atau studi banding ke daerah sementara DPRD Kota Banjarmasin ada Kunjungan ke daerah. “Pokoknya kita saling bertukar informasi disini,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Budi Wijaya menyampaikan tujuan kunjungan ini adalah untuk



Sekjen DPR RI dan Deputi Persidangan bersama Pimpinan DPRD Banjarmasin

memperdalam tentang mekanisme dan tanggung jawab Bamus yang ada di DPRD maupun ingin mendapat gambaran yang ada di DPR RI. Menurutnya, memang ada perbedaan antara Bamus DPR RI dan DPRD.

“Kunjungan ini untuk lebih menambah informasi kita. Sistem apa yang bisa dipakai atau tidak bisa kita laksanakan di Bamus DPRD. Semua yang kita dapat disini akan kita implementasikan sesuai dengan yang kita dapatkan hari ini,” jelas Budi. ■

(ria), Foto: Azika/hr



Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial bersama Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Penerbitan menerima penghargaan PRI Award 2017 di Bali

Biro Pemberitaan Parlemen Raih Dua Penghargaan PRI Award 2017

Program Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2017 memberikan dua penghargaan kepada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk kategori media internal sub kategori *website* dan sub kategori *new media/media sosial*).

Pemberian penghargaan ini diberikan dalam acara ajang kompetisi PR paling komprehensif di Indonesia yang diselenggarakan oleh Majalah *Public Relations (PR) Indonesia Award (PRIA)* di Bali, Jumat (24/03). PRIA 2017 diikuti oleh Divisi/Biro Humas Perusahaan swasta/BUMN/Organisasi/Lembaga/ Kementerian/ Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dengan mengirimkan karya kreatif/program/ pencapaian PR terbaik korporasi/organisasinya sepanjang Januari-Desember 2016.

Penjurian PRIA 2017 kategori media internal dilakukan oleh dewan juri pada tanggal 6 sampai dengan 9 APRIL 2017 di Jakarta terdiri dari Abang Edwin SA (konsultan media digital), Asmono Wikan (founder & CEO PR Indonesia), Danu Kusworo (fotografer senior), Silih Agung Wasesa (Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia), dan Zinnia Sompie

(Asosiasi Desainer Grafis Indonesia).

Ketua Penyelenggara, Aswoko Wikan mengharapkan para penerima dapat meningkatkan lagi kompetensi public relations untuk mendukung dan mensosialisasikan kebijakan para pimpinan lembaga dan perusahaan.

Sedangkan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Djaka Dwi Winarko (DDW) mengatakan bahwa Award yang diberikan oleh pihak dari luar lembaga Setjen DPR RI terhadap *website* dan *new media* atau media sosial yang dikelola Biro Pemberitaan Parlemen adalah penghargaan atas upaya kita bersama dari jajaran Biro Pemberitaan Parlemen dalam mensosialisasikan berbagai macam kegiatan DPR RI, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melalui media yg dimiliki yaitu *website* www.dpr.go.id dan empat media sosial yaitu Facebook DPR RI, Twitter @dpr_ri,

Instagram @DPR RI, dan Youtube DPR RI.

"Penghargaan ini bukan hasil akhir kegiatan pemberitaan tetapi menjadi titik awal meningkatkan program pemberitaan yang lebih kreatif, lebih variatif dan lebih bagus dalam menjembatani DPR RI dengan masyarakat," demikian harapan DDW.

Posisi ranking www.dpr.go.id menempati urutan ke 16 dari 969 website versi alexa.com untuk kategori regional, indonesia (27/03/2017;09:21). Twitter @dpr_ri dibuat pada tanggal 3 Maret 2014 dan saat ini *followers* berjumlah 85.000 *followers*. Facebook Fanpage DPR RI dibuat pada tanggal 3 Maret 2014 dan saat ini mencapai 133.097 *likes*. Instagram @DPR_RI dibuat pada tanggal 1 Januari 2016 dan saat ini berjumlah 63.900 *followers*. Youtube DPR RI, dibuat pada tanggal 3 Maret 2014 dan saat ini mencapai 3.275 video dengan 873 *Subscribes*. ■



Studi lapangan PKAKN - BKD di Provinsi Papua

SAP Berbasis Akrual Terkendala Komitmen Kepala Daerah



Komitmen Kepala Daerah menjadi salah satu kendala yang dihadapi BPK terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Papua atas LKPD tahun 2015 menunjukkan masih terdapat Pemerintah Daerah yang belum menerapkan peraturan Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Beni Ruslandi dalam paparannya di hadapan TIM Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian Dewan, yang melaksanakan studi lapangan dan tinjauan pelaksanaan akuntabilitas keuangan daerah di Provinsi Papua (29/03).

Lebih lanjut Beni mengemukakan bahwa masih terdapat empat Kabupaten yang belum menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual. Empat Kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Mamberamo Raya. Beni juga mengemukakan bahwa terdapat tiga kelemahan terkait implementasi akrual. "Pertama tidak adanya perencanaan secara khusus terkait implementasi SAP berbasis akrual, kedua belum adanya kebijakan khusus terkait persiapan/penempatan SDM dalam menghadapi perubahan SAP berbasis kas menjadi SAP berbasis akrual, dan ketiga kebijakan penempatan SDM dalam hal mutasi, promosi dan diklat masih bersifat penjenjangan serta dukungan dari seluruh SKPD yang belum diungkapkan dalam pernyataan komitmen secara tertulis," urai Beni lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Helmizar selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas

Keuangan Negara, Badan Keahlian Dewan, juga mempertanyakan perolehan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dalam lima tahun beturut turut pada sebelas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. "Bagaimana BPK mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi penyebab dikeluarkannya opini TMP tersebut," tanya Helmizar. Menjawab pertanyaan tersebut Beni menjelaskan, "Penyebab utama pemberian opini tersebut antara lain, meliputi; akun kas di bendahara pengeluaran yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban, Akun persediaan yang metode penilaiannya tidak ditetapkan sesuai SAP, Akun Aset Tetap yang tidak tertib, Akun Aset Lainnya yang tidak memiliki perincian, dan terakhir adalah Akun Belanja Jasa, Belanja Hibah, dan Bansos.

Senada dengan BPK, Darius selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, yang ditemui secara terpisah menjelaskan, dari tiga belas Pemda yang menggunakan SIMDA Keuangan, kendala yang dihadapi

terkait penyusunan LKPD berbasis akrual mencakup; kurangnya komitmen pimpinan SKPD/OPD untuk penerapan SAP berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan SIMNDA pendapatan secara penuh. Selain hal tersebut, Darius juga menjelaskan, "Kurangnya pemahaman tentang SAP berbasis akrual oleh SDM terkait dari tingkat Pimpinan sampai dengan tingkat staf, terbatasnya SDM yang kompeten di bidang akuntansi, serta pihak Pemda yang belum percaya diri untuk menyusun LKPD secara mandiri, menjadi tambahan lengkap dalam kendala penerapan SAP berbasis akrual," ujarnya.

Sedangkan upaya pendampingan dan pembinaan oleh BPKP terkait penerapan SAP berbasis akrual, Darius mengatakan, "Kami sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan, kami juga mengadakan pelatihan aplikasi SIMDA keuangan berbasis akrual dan SIMDA BMD, bahkan pendampingan serta bimbingan teknis pun kami lakukan kepada Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota."

<http://www.papua-adventures.com>

(Tim PKAKN/D/S) Foto: D/S



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi sejumlah Anggota DPR RI menerima kunjungan Ketua Parlemen Bahrain, Kamis (30/3). Foto: Runi, Jaka

Ketua DPR RI Setya Novanto bersama sejumlah Anggota DPR RI, Kepala BNN dan Artis dalam acara Coffe Morning dengan tema "Indonesia Darurat Narkoba".
Jum'at (31/3). Foto: Jaka



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi sejumlah Anggota DPR RI meninjau lokasi tanah sengketa antara warga dengan Resimen Induk Kodam Jaya. Kamis (30/3). Foto: Andri